

ARSITEKTUR DAN PERMUKIMAN KELOMPOK SOSIAL TERPINGGIRKAN DI KOTA DENPASAR PERSPEKTIF KEBUDAYAAN KEMISKINAN

Oleh:

Sulistiyawati

Guru Besar Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik dan Dosen Program Pascasarjana & Doktor
Kajian Budaya Universitas Udayana
Email: ptbincip@.centrin.net.id

ABSTRACT

Architectural picture of a dwelling area can indicate its social, economic, and cultural features of the community concerned. Indonesia, as one of developing countries, for example, has many dwelling areas for marginalized social groups one of them is Denpasar that often creates architecturally disordered city. The purposes of this paper are to know and understand: (1) the causes of disorder of marginalized dwelling; (2) the negative impacts of the disorder; (3) the solutions for architectural ordering of that dwelling; and (4) the obstacles in implementation of ordering program and its alternative solutions.

The findings of this study indicate that the causes of layout and environment disordering of marginalized group in Denpasar are: that this marginalized group is out of planning and facilities development of the city; most of these poor groups earn their livings in informal sector, adding with various small family businesses in very narrow house yard that make supporting facilities crowded and mixed with industrial disposal they create; they tend to choose to live in the cheapest areas and close to the center of the city, no matter how slump it is. Other cause is culture of poverty.

Its negative impacts are: hampering of the beauty of the city and waste of resources; sources of various epidemic sicknesses; sources of psychological or mental sicknesses such as hate of staying at home and social emotional sensitive. The ordering solutions need the roles of all concerned, particularly related institutions, non government organizations those concern with the problems of slump areas, either from technique-technological or socio-cultural points of views, with active participation of the society of that slump area. The impeding factors to the implementation of the programs are: the obstacle from the policy makers, solved through mental improvement and understanding the needs of the city poor. The obstacles from the target society and its alternatives to be solved include: land right, the determination to stay, poverty, personal characteristic and behavior of the social group.

Key words: *dwelling architecture of the city poor.*

ABSTRAK

Arsitektur suatu wilayah permukiman dapat menunjukkan baik buruknya keadaan sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat yang bermukim di situ. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang misalnya banyak memiliki permukiman kelompok sosial kota terpinggirkan, salah satunya di Denpasar, yang sering menimbulkan kesemrawutan arsitektur kota. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: 1) Penyebab kesemrawutan permukiman terpinggirkan; 2) Dampak negatif dari kesemrawutan tersebut; 3) Solusi untuk penataan arsitektur permukiman tersebut; 4) Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program penataan dan alternatif pemecahannya.

Hasil studi menunjukkan, penyebab kesemrawutan tata ruang dan lingkungan kelompok sosial terpinggirkan di kota Denpasar adalah: kelompok masyarakat ini luput dari perencanaan dan sentuhan pembangunan fasilitas kota; kebanyakan kaum miskin ini bermata pencaharian dari sektor informal,

ditunjang berbagai bentuk usaha/industri kecil di lahan sempit, sehingga padat fasilitas penunjang dan bercampur dengan limbah buangan idustri mereka; mereka cenderung memilih tinggal di kawasan yang paling murah dan dekat dengan pusat kota, walau bertumpuk-tumpuk. Penyebab lainnya adalah budaya kemiskinan (culture of poverty).

Dampak negatipnya adalah: menjadi penyakit dari keindahan kota dan pemborosan sumber daya kota; sumber berbagai jenis penyakit epidemi; sumber penyakit psikis atau kejiwaan, seperti tidak suka tinggal di rumah dan kerawanan sosial. Solusi penataannya membutuhkan peran semua pihak secara timbal balik, khususnya misi dinas terkait, LSM yang paham kompleksitas permasalahan permukiman kumuh, baik dari segi teknis-teknologis ataupun sosial-budaya, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat permukiman kumuh itu sendiri. Faktor-faktor kendala pelaksanaan program: kendala dari pihak penentu kebijaksanaan, dipecahkan dengan perbaikan mental dan pemahaman terhadap kebutuhan dari masyarakat miskin kota. Kendala dari masyarakat sasaran program dan alternatif yang harus dipecahkan, berupa: kepemilikan lahan, semangat menetap, kemiskinan, kepribadian dan sikap fatalistik kelompok sosial ini.

Kata kunci: *Arsitektur Permukiman Kelompok Miskin Kota*

PENDAHULUAN

Arsitektur dan permukiman adalah dua hal yang selalu berkaitan atau tak terpisahkan. Setiap berbicara permukiman sesederhana apapun selalu melibatkan masalah arsitektur. Arsitektur dapat menjadi cermin dari keberadaan suatu permukiman dari kelompok sosial tertentu. Dengan demikian, arsitektur suatu wilayah permukiman dapat menunjukkan baik buruknya keadaan sosial, ekonomi dan budaya dari warga/masyarakat yang bermukim di situ.

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, memiliki masalah perkotaan yang sangat kompleks. Sebagai salah satu ciri negara berkembang adalah sangat pesatnya perkembangan penduduk perkotaan terutama kota-kota besar dari negara tersebut, sebagai akibat dari tingginya angka pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kaum urban dari kalangan miskin, biasanya menyasar pinggiran kota yang belum memiliki fasilitas ruang kota, agar lebih murah. Salah satu akibatnya adalah munculnya permukiman kelompok sosial kota terpinggirkan, yang tidak terencana, tidak memiliki fasilitas infrastruktur, yang semakin lama semakin berkembang secara alami dan akhirnya tumbuh tidak terkendali menjadi wilayah permukiman yang serba semrawut dan kumuh. Sementara itu pemerintah kota belum siap dengan antisipasi suprastruktur (peraturan

ruang kota yang pasti) dan kelengkapan infrastruktur ruang kota (fasilitas jalan, air bersih, riol, fason, fasum) untuk wilayah tersebut.

Salah satu ciri arsitektur permukiman dari kelompok sosial terpinggirkan adalah rumah dibangun tidak permanen, sangat sederhana dan sempit serta berdempetan sebagai akibat dari padatnya penduduk kampung. Sanitasi lingkungannya sangat buruk bahkan ada yang dapat disebut sebagai rumah tidak layak huni. Misalnya, ada rumah yang luasnya hanya beberapa meter persegi saja, tinggi satu meter, terbuat dari plastik atau kardus dan menempel pada tembok orang lain. Apabila kemudian kita berpaling kepada pendapat Eko Budihardjo (1983: 5) bahwa arsitektur adalah pengejawantahan yang jujur dari tata cara kehidupan masyarakat, maka ciri-ciri arsitektur masyarakat kampung kota seperti tersebut di atas, adalah salah satu cermin kemiskinan sudut kota. Penduduk miskin kota ini sudah biasa hidup dalam sistem sosial, ekonomi dan budayanya sendiri yang disebut budaya kemiskinan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya, yaitu: 1) Apa yang menjadi penyebab kesemrawutan permukiman terpinggirkan; 2) Bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesemrawutan permukiman terpinggirkan; 3)

Bagaimana solusi penataan arsitektur permukiman terpinggirkan; 4) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program penataan dan bagaimana alternatif pemecahannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi-studi tentang kota di Dunia Ketiga menunjukkan adanya interkoneksi sistem yang erat antara orang kaya di kota dan orang miskin kota, adanya ketergantungan ekonomi kolonial dari kelas menengah yang naik bintangnya di antara puluhan ribu orang miskin. Kelompok sosial miskin kota hidup dari berburu dan meramu di hutan belukar kota, yang setiap hari pergi berburu pekerjaan. Kehidupan mereka didasarkan atas sisa-sisa: sisa pekerjaan, sisa perdagangan, sisa ruang hidup, rumah terbuat dari sisa-sisa. Mereka mendiami celah-celah sistem industri kota dan makan dari buangnya. Akan tetapi, meskipun sifatnya marginal/terpinggirkan, pasukan compang-camping kaum miskin perkotaan itu menjalankan fungsi sosial yang penting meskipun masih belum diakui, khususnya bagi lahirnya kelas menengah di kota, yang sangat berhutang budi kepada adanya tenaga dan jasa murah. Kaum miskin bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, pesuruh, sopir, dan sejumlah besar tenaga kasar berbagai bentuk. Kalau ada hubungan simbiosis antara masyarakat kota dan marginalitas, yang menarik keuntungan besar sudah pasti ialah kelas menengah (Lomnitz, 1977: 208).

1. Pengertian Kelompok Sosial dan Permukiman Terpinggirkan

Kelompok sosial adalah kumpulan dari sejumlah orang (berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu) yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi (Horton & Hunt, 1993: 214-216). Kelompok sosial terpinggirkan atau lebih tepatnya kelompok sosial marjinal yaitu kelompok sosial yang menjadi bagian dari dua budaya atau dua masyarakat, tetapi tidak termasuk secara penuh (utuh) pada salah satu budaya atau masyarakat tersebut (bandingkan, Horton & Hunt, 1993: 402). Mungkin definisi ini lebih mengena dari sudut sosial-budaya, untuk menggolongkan

masyarakat urban di permukiman kumuh di kota-kota besar. Karena mereka tidak menjadi bagian penuh dari masyarakat kota tujuan, maka mereka luput dari perencanaan dan sentuhan pembangunan fasilitas kota.

Tidak tersentuhnya kelompok sosial terpinggirkan dari program pembangunan fasilitas kota, juga disebabkan oleh karena mereka tinggal di wilayah kota yang terpinggirkan, yang tidak mesti harus terletak di pinggiran kota, tetapi bisa jadi dekat dengan pusat kota. Hal ini didasarkan pada teori struktur kota yaitu *Trade of Model* direlasikan dengan *Bid-rent Theory*. Menurut teori analisis sewa yang ditawarkan (*bid-rent analysis*), meskipun pola-pola tata guna lahan di perkotaan itu merupakan hasil dari aneka faktor alami dan manusiawi, dapat dikatakan pada dasarnya semua itu merupakan produk belaka dari motivasi ekonomis. Terhadap semua situs di dalam kota terdapat persaingan. Berhasilnya orang menempati suatu situs di kota, pada akhirnya hanyalah karena tanah tersebut dapat diperas manfaatnya sebanyak-banyaknya, dan mampunya orang yang bersangkutan membayar harga sewanya. Persaingan tersebut paling kuat terjadi di bagian pusat kota, karena di kawasan itu tersaji lokasi-lokasi yang paling menguntungkan; di samping tanah di situ memang langka. Karena alasan itu pula, maka harga tanah di kawasan pusat kota itu amat mahal (Daldjoeni, 2003: 198).

Trade off model, bertalian erat dengan kondisi-kondisi perilaku yang diidealkan dari segi kemampuan ekonomi. Sehubungan itu, diasumsikan adanya kota dengan pusat tunggal yang terletak di dataran tanpa topografi yang menonjol, sedang segala kegiatan penduduknya bertumpuk di pusat kota. Di dalam kota, biaya transportasi meningkat langsung mengikuti jarak yang ditempuh dari pusat kota, namun sewa yang tergantung dari keterjangkauan (*accessibility*) saja, berbanding terbalik dengan jarak. Artinya semakin menjauhi pusat kota, semakin menurunkan sewa. Para pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menurut tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kekuatan kantong mereka. Jika hal ini dihubungkan dengan kegiatan perdagangan eceran atau pertokoan,

keterjangkauan tempat kegiatan mereka oleh penduduk amatlah penting, sehingga derajat menurunnya *economic rent* yang ingin mereka pakai untuk berbelanja, amat curam. Karena itulah maka, golongan ekonomi lemah demi penghematan biaya transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota yang kebetulan juga merupakan zone perumahan yang sewanya murah. Dengan demikian, demi murahnya hidup, mereka bertumpuk-tumpuk di kawasan yang berpenduduk padat sekali. Karena dengan cara demikianlah, maka *bid-rent gradient* mereka lerengnya sedang, tak begitu curam (Daldjoeni, 2003: 201).

Dengan demikian maka, dari segi ekonomi kelompok sosial marjinal/terpinggirkan adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yang memilih tinggal di bagian wilayah kota terpinggirkan pula dari pertimbangan nilai ekonomis. Dengan demikian, pengertian permukiman kelompok sosial terpinggirkan yang dimaksud di sini, adalah permukiman dari kelompok sosial miskin kota yang merupakan zone perumahan yang sewanya murah, karena kondisi tanah yang paling tidak menguntungkan dari motivasi ekonomi, misalnya di pinggiran bantaran sungai Tukad Badung; atau secara geografis, wilayah-wilayah kota yang sering tergenang banjir di musim hujan dan yang tidak ditunjang fasilitas kota.

2. Pengertian Kemiskinan

Berita tentang kemiskinan yang melanda negeri ini tidak pernah luput dari sorotan berbagai media massa di tanah air atau dari luar negeri. Penanganan program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu, dari rezim satu ke rezim terakhir tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah tuntas. Hal ini menurut Soedjatmoko (1986: 1 & 159) membuktikan bahwa, ternyata tingkat pengetahuan masyarakat dewasa ini mengenai keanekaragaman wajah kemiskinan di tanah air masih sangat terbatas. Masyarakat tidak tahu struktur-struktur sosial dan kebudayaan kemiskinan di negeri ini. Masyarakat tidak tahu dengan pasti siapa golongan yang paling miskin, di mana mereka berada dan sebab-musabab dari kemiskinan yang sangat mendalam itu. Masyarakat pun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara

mencapainya dan masyarakat tidak akan dapat mengetahuinya selama pengetahuan tentang masalah kemiskinan tidak dikembangkan secara sistematis. Di dalam keadaan seperti sekarang ini, menurut Soedjatmoko susunan masyarakat serta sistem politik yang akan dapat bertahan, hanyalah suatu susunan masyarakat serta sistem politik yang sanggup mengatasi permasalahan kemelaratan negeri ini.

Dalam ilmu sosial dibedakan antara kemiskinan mutlak dan relatif. Kemiskinan mutlak tidak memungkinkan seseorang menyelenggarakan hidup manusiawi. Kemiskinan mutlak berarti kemelaratan fisik dan material yang nyata sekali. Bentuk yang keras adalah kematian dini, entah karena kelaparan, entah karena penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok (*basic needs*) dan minimum (bagi kelangsungan hidup) adalah konsep di belakang kemiskinan mutlak. Pemenuhan kebutuhan pokok dan minimum menurut *International Labour Organizations* (ILO, 1976, 7f) meliputi kebutuhan minimum sebuah keluarga akan pangan, papan, dan sandang. Selain, perlunya disediakan sejumlah pelayanan mendasar, seperti air minum bersih, sanitasi, transportasi, lembaga kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan kerja dengan imbalan yang wajar bagi tiap orang yang sanggup dan ingin bekerja. Juga harus dipenuhinya kebutuhan yang bersifat kualitatif, yaitu lingkungan hidup yang sehat, manusiawi, memuaskan, partisipasi rakyat pada semua keputusan yang menyangkut hidup dan keperluan hidupnya, serta kebebasan-kebebasan individual. Sedangkan kemiskinan relatif bukan saja meliputi ketidakmerataan ekonomi seperti pada kemiskinan mutlak, tetapi juga meliputi ketidakmerataan kesempatan dan peluang di segala kehidupan lainnya. Gejala-gejala yang sama juga mewarnai hubungan internasional, sebagaimana tampak dalam istilah-istilah, jurang antara Dunia Utara dan Selatan atau antara Dunia Barat dan Timur (Muller, 2006: 5-6).

3. Arsitektur Permukiman Kelompok Sosial Terpinggirkan

Di dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik bagi kelompok sosial masyarakat di permukiman

terpinggirkan ini, pihak perencana dan pelaksana pembangunan tidak hanya dituntut untuk mengetahui masalah-masalah atau kendala-kendala yang bersifat fisik saja, tetapi juga yang terkait dengan situasi sosial dan budaya masyarakat sasaran program. Terlebih-lebih terkait dengan lingkungan buatan yang disebut arsitektur, yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan/keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mangunwijaya (1981; Budihardjo, 1983: 9) bahwa, masalah arsitektur meliputi kurang lebih 80 % masalah sosial kemasyarakatan, dan baru kemudian sisanya yang 20 % menyangkut masalah teknis teknologis. Kesemrawutan tata ruang dan lingkungan kita disebabkan karena arsitektur terlalu banyak bicara tentang “*engineering*” daripada masalah sosial. Mungkin ini merupakan akibat dari istilah arsitektur yang diartikan secara sempit, yaitu *Arche* = utama, awal, dasar; dan *Tekton* = kestabilan, statika bangunan. Sedangkan dalam pengertian aslinya, *Wastu* (dalam bahasa Sanskrit, *Vasthu*), tidak hanya berarti bangunan akan tetapi segala yang terbentuk oleh tangan manusia secara menyeluruh. “*Total Achitecture*”. Jadi semua segi kehidupan “ipoleksosbud-hankamnas” tecakup (ilmu, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional).

Bagi Mangunwijaya ada dua masalah pokok yang harus diperhatikan, ialah: Guna dan Citra. Guna menunjukkan pada keuntungan, pemanfaatan dan pelayanan yang dapat diperoleh dari bangunan. Guna dalam arti kata aslinya tidak hanya berarti bermanfaat, tetapi lebih dari itu: punya daya yang menyebabkan manusia bisa hidup lebih nyaman, sehingga prestasi meningkat. Bila udara panas, misalnya suatu bangunan kantor bisa berdaya-guna” karena di dalamnya tetap sejuk terlindung sehingga suasana kerja bergairah. Citra menunjuk suatu gambaran (*image*), suatu kesan penghayatan yang menangkap arti bagi seseorang. Citra gedung istana yang megah tentulah melambangkan kemegahan juga, kewibawaan seseorang kepala Negara. Sebaliknya, gubug reyot adalah citra yang langsung menggambarkan keadaan penghuni miskin yang serba reyot pula keadaannya. Citra

menunjukkan tingkat kebudayaan, sedangkan guna lebih menuding pada segi peradabannya. Arsitektur seperti halnya pakaian, mobil harus memiliki keduanya: guna maupun citra. Tidak hanya harus bermanfaat, tetapi juga indah, menarik, berkepribadian (Mangunwijaya, 1995:31).

Kuswartojo (1991:76) mengatakan bahwa arsitektur dibuat oleh arsitek untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti: menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan; mengembangkan kehidupan menjadi lebih bermakna; dan membuat kehidupan lebih nyaman, dengan cara menertibkan, mengorganisasi dan mengatur lingkungan. Masalahnya adalah: Pertama, siapa manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya itu; Kedua, dengan cara bagaimana lingkungan ditertibkan; 3) Siapa yang wajib, yang bertanggungjawab, yang berhak dan yang mampu mengorganisasikan dan menertibkan lingkungan tersebut.

Sudah menjadi fakta, penghuni utama permukiman terpinggirkan di kota besar kebanyakan adalah kaum miskin, di mana mata pencahariannya lebih banyak dari sektor informal. Setiap orang berupaya memiliki suatu usaha atau industri kecil untuk kelangsungan ekonomi rumah tangganya. Semua jenis usaha yang dilakukan warga kampung miskin kota ini tidak lain adalah bentuk-bentuk strategi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang paling dasar. Keterbatasan modal, keterbatasan lahan dan atas berbagai pertimbangan lain, maka usaha atau industri dan pembuangan limbah mereka lakukan di lingkup rumah atau pekarangan mereka masing-masing. Bentuk arsitektur perumahan yang dibangun akan disesuaikan dengan guna yang semaksimal mungkin mendukung usaha tersebut, yang berarti otomatis arsitekturnya akan mencitrakan bentuk usaha dan keberadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat miskin yang hidup di dalamnya.

Gambaran umum wajah kampung kumuh di permukiman terpinggirkan di kota-kota besar adalah wajah arsitektur rumah seadanya saja, tata ruang bangunan semrawut dengan penampilan jorok, populasi bangunan padat

dengan hunian yang tinggi, penggunaan bahan bangunan bekas dan murahan dengan sistem konstruksi yang jauh di bawah standar baku keselamatan untuk penghuninya, lingkungan sekitar selalu kotor, becek, sanitasi buruk, sumur sebagai sumber air bersih tercemar.

Penelitian di sebuah wilayah permukiman terpinggirkan oleh Setiawan (2003: 66-67) menemukan bahwa lingkungan fisik kampung-kampung sepanjang Kali Code Yogyakarta dari segi sosial-budaya memiliki keterkaitan dengan perilaku masyarakat di kampung tersebut secara dialektik, dalam arti saling mempengaruhi. Keterbatasan fisik, terutama dari segi luasan area serta fasilitas umum yang ada (MCK, air bersih, dan lain-lain) menuntut mereka untuk menggunakan fasilitas umum secara bersama-sama. Hal ini menyebabkan intensitas interaksi sosial antar penduduk kampung tinggi, yang secara tidak langsung menyebabkan tingkat solidaritas sosial di antara penduduk kampung tersebut juga menjadi kuat.

Sebaliknya, tingginya tingkat hubungan sosial dan kuatnya solidaritas sosial di antara mereka, secara *incremental* (motivasi semangat berswadaya) mengharuskan mereka membuat susunan lingkungan fisik agar dapat mewadahi berbagai jenis kegiatan dan bentuk perilaku sosial mereka. Dengan kata lain, perilaku dan lingkungan fisik pada kampung tersebut secara dialektik saling mempengaruhi, dan akhirnya mewujudkan suatu pola kehidupan yang spesifik. Ditemukan bahwa, konsep-konsep mengenai ruang privat, semi privat dan publik, *crowding*, tekanan lingkungan, stress dan lain-lain berkaitan erat dengan susunan ruang-ruang dalam rumah, ruang antar rumah serta lingkungan permukiman secara keseluruhan.

Menurut Turgut (2001:6) permukiman kumuh dan proses pengkumuhan merupakan suatu objek yang kompleks. Oleh karena itu, studi terhadap permukiman kumuh tidak bisa hanya dilakukan pada satu subjek saja dan menganggap hal tersebut merupakan masalah sosial saja, atau hanya masalah penyediaan hunian saja, atau hanya masalah ekonomi dan politik saja. Harus ada pendekatan yang menyeluruh untuk mencapai definisi dan interpretasi yang lebih komprehensif. Analisis struktural dari pola

perumahan kumuh di dalamnya termasuk empat komponen yaitu: komponen budaya, perilaku, sosial-ekonomi dan komponen spasial.

Walaupun ada empat komponen yang ditawarkan dalam analisis struktural perumahan kumuh, namun dalam tinjauan ini penekanan akan diarahkan lebih besar ke komponen budaya, karena menurut persepsi penulis lebih tepat untuk materi matrikulasi Program Magister Kajian Budaya. Walau demikian, komponen lain akan tetap diberi porsi sewajarnya. Komponen budaya yang dimaksud di sini adalah adanya masalah Budaya Kemiskinan yang menyebabkan lemahnya Modal Sosial untuk pembangunan.

4. Budaya Kemiskinan dan Modal Sosial

Budaya kemiskinan (*culture of poverty*) merupakan teori yang mula-mula dikemukakan oleh Oscar Lewis, bahwa ada cara hidup yang pada umumnya sama di antara orang-orang miskin di kota-kota di banyak daerah di dunia (Keesing, 1992: 281). Budaya kemiskinan merupakan suatu cara hidup dan cara pandang, yang lemah dan gampang puas, dan dialami serta dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang miskin. Penyebab utama kemiskinan terletak pada mentalitas, budaya miskin, dan ketiadaan Modal Sosial. Masyarakat sulit melepaskan diri dari kungkungan mentalitas yang berorientasi pada apa yang dapat dinikmati pada hari ini. Rendahnya aspirasi, lemahnya pengendalian diri untuk merajut masa depan yang lebih baik, tidak menghargai waktu, ketidaksabaran dalam menunda keinginan sesaat, dan yang lebih menjerumuskan sikap fatalistik yang sangat kuat, merupakan determinan penting yang menipiskan Modal Sosial (Hasbullah, 2006: 70).

Lebih lanjut Hasbullah menyebutkan bahwa dalam terminologi Modal Sosial, faktor yang demikian dipahami sebagai bertahannya nilai-nilai dan budaya kemiskinan sebagai konsekuensi dari kuatnya kultur dan orientasi *inward looking* di suatu kelompok masyarakat. Kecenderungan tersebut merupakan hambatan besar bagi berkembangnya ide dan pemikiran baru mengenai fungsi waktu, fungsi uang dan berbagai keharusan lainnya yang berkaitan dengan pengayaan derajat kehidupan sosial seseorang.

Modal Sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lain yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada Modal Sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antara sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti kebajikan sosial (*social virtue*). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang bersifat imbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial. Robert D Putnam (2000; Hasbullah, 2006:5) memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat Modal Sosial yang rendah.

ARSITEKTUR PERMUKIMAN TERPINGGIRKAN DI KOTA DENPASAR

Sebagai salah kota besar di Indonesia, Denpasar tidak luput dari masalah permukiman kumuh. Kebanyakan permukiman terpinggirkan ini berada di sekitar bantaran sungai Tukad Badung. Lokasi permukiman kumuh per kecamatan di Denpasar, terbesar berada di Kecamatan Denpasar Barat, cukup besar di Kecamatan Denpasar Timur dan sedikit di Kecamatan Denpasar Selatan.

1. Penyebab Kesemrawutan Permukiman Terpinggirkan di Denpasar

Kaum urban luar kota yang menempati permukiman kumuh di Denpasar banyak datang dari Singaraja dan Karangasem, tetapi paling didominasi oleh kaum urban dari Jawa terutama

Jawa Timur (Banyuwangi, Jember). Ada pola kecenderungan kaum urban dari luar Bali, terutama Jawa, dalam menetap sebagai berikut. Bila dia datang menetap sendiri cenderung memilih menyewa kamar atau rumah milik dari warga setempat, ditempati beberapa orang berarti bentuk dan ukuran ruang huniannya terbatas atau sempit. Sedangkan bila mereka datang membawa keluarga cenderung menetap dengan menyewa tanah atau lahan kosong terbatas, sehingga walau kelihatan bentuk dan ukuran ruang peruntukan rumahnya lebih luas namun bila dibagi per jumlah keluarga tetap saja tergolong sempit. Sempitnya lahan yang harus menampung berbagai bentuk kegiatan yang ditekuni juga berpengaruh terhadap kesemrawutan arsitektur permukiman terpinggirkan ini.

Terbukti dari hasil penelitian aspek spasial perumahan kaum urban di permukiman kumuh kota Denpasar oleh Diputra (2003) menemukan bahwa, ruang-ruang pada rumah kumuh bersifat multifungsi, karena penghuni memasukkan beragam kegiatan ke dalamnya. Privasi ruang di dalam rumah tidak optimal, namun tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu karena sudah dibiasakan dan dimaklumkan. Organisasi ruang bersifat linier karena terjadinya penambahan ruang hanya bisa dilakukan sangat terbatas sebagai akibat dari minimnya lahan. Kualitas ruangan dan *performance* yang dihasilkan kurang baik sebagai akibat dari rendahnya kualitas bahan bangunan dan sempitnya dimensi ruang, yang akhirnya menyebabkan rasa ketersesakan.

Candrawati (2003) yang melihat dari sudut struktur dan konstruksi rumah kumuh di Denpasar menemukan bahwa struktur dan konstruksi atap menggunakan kuda-kuda, balok dinding, gording, usuk, reng, bubungan dan papan bubungan termasuk dengan pemakaian bahan dan sistem sambungan konstruksinya. Struktur dan konstruksi dinding menggunakan perpaduan antara batako dan papan atau batako dan gedeg. Sistem struktur pondasi dan lantai tidak layak dari segi kekuatan dan keamanan, yaitu menggunakan pondasi dari pasangan batako ditanam pada kedalaman 50 cm dan diteruskan ke atas sebagai dinding.

Dari penelitian aspek non fisik yang menarik ditemukan bahwa, penduduk perumahan kumuh di Denpasar adalah kaum urban yang bila diukur dari segi pendapatan perkapitanya sebenarnya tidak tergolong miskin sungguhan (kemiskinan mutlak), karena mereka mampu membiayai hidup mereka sendiri dan terkadang mampu mengirimkan uang kepada sanak famili di kampung halamannya. Hanya memang tampilan tempat tinggal dan lingkungan hidupnya saja yang tampak kumuh dan miskin (Arieska, dkk. 2003).

Dari hasil penelitian Anindiyasari (2004) di Dusun Jematang, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat juga diketahui bahwa, ada beberapa faktor sosial-budaya penyebab tetap terjadinya kesemrawutan arsitektur dan buruknya kualitas bangunan rumah serta lingkungan pada permukiman terpinggirkan yaitu: Tidak adanya kepedulian masyarakat sekitar terhadap kondisi rumah atau lahan yang mereka tempati sebagai akibat dari tidak adanya rasa memiliki, karena kebanyakan rumah yang ditempati adalah rumah kontrakan milik penduduk asli setempat. Demikian pula bagi mereka yang hanya menyewa tanah kosong, selalu ada anggapan bahwa mereka akan tinggal untuk sementara saja, sehingga rumah yang dibangun hanya berwujud sekedar saja, apalagi kebanyakan profesi atau mata pencaharian mereka sebagai pedagang kecil dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Biasanya sisa pendapatan dari hasil penyisihan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak dialokasikan bagi perbaikan fisik rumah yang ditempati, melainkan untuk memperbesar modal usaha dan untuk dikirim ke daerah asalnya.

Kurangnya rasa kepemilikan terhadap rumah juga diketahui dari hasil penelitian Suwitri (2006:81) yang meliputi kota Denpasar sebagai berikut. Kaum urban melihat rumah yang mereka tempati hanya sebagai tempat tinggal sementara. Sebagian terbesar dari mereka (60%) menyatakan bahwa ia tidak ingin tinggal menetap karena tujuan mereka hanya untuk mencari uang (pekerjaan), sebagai modal untuk buka usaha di kampungnya bila sudah mencukupi.

Faktor sosial-budaya seperti inilah menjadi kendala bagi penataan dan perbaikan arsitektur

dan kawasan kumuh atau terpinggirkan di Kota Denpasar. Karena seperti dijelaskan oleh Anindiyasari, penduduk pendatang ini tidak memanfaatkan kelebihan pendapatannya untuk berinvestasi rumah tinggal di Bali, sebab mereka selalu berpikir akan kembali ke kampung halamannya setelah cukup berhasil (“kaya”). Menurut hemat penulis, ini menandakan adanya nilai-nilai budaya yang tidak cocok untuk pembangunan yaitu cepat puas dengan keberhasilan yang dicapai. Tidak ada semangat yang lebih kuat untuk mandiri, semangat berusaha dan semangat terus maju, terbukti selalu ingin kembali ke kampung, selalu merindukan keindahan pengalaman masa lalu, mengangankan selalu berkumpul bersama keluarga ataupun famili di kampung asal seperti masa lalunya. Lebih mementingkan primordialisme suku dan daerah. Tidak memiliki visi dan semangat untuk membangun dalam kebersamaan di daerah permukiman tempatnya mencari kerja, karena menganggap etnis lokal bukan bagian dari dirinya atau saudaranya. Inilah yang oleh Putnam (2000) dan Abdullah (2006) disebutnya sebagai Modal Sosial yang rendah.

Tepat seperti dikatakan Kuntowijoyo (1987: 105) bahwa, tumbuhnya kota telah mengubah lingkungan komunal desa menjadi lingkungan individualis. Di sini kelangsungan hidup perorangan merupakan tanda tanya besar, sehingga pekerjaan menjadi motif utama orang untuk tinggal. Di kota, lingkungan tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk bermasyarakat, tetapi sebagai tempat bekerja semata-mata. Manusia kota telah kehilangan keinginan untuk hidup bermasyarakat, keinginan untuk bertanggung jawab, dan keinginan untuk saling bergantung (berhubungan sosial). Individualisme di kota-kota besar telah juga menghilangkan kohesi sosial, sekalipun solidaritas baru dalam asosiasi-asosiasi dapat menggantikan kohesi itu.

Seperti halnya keinginan kaum urban di permukiman kumuh kota Denpasar, selalu ingin kembali ke asalnya setelah berhasil, berarti mereka menganggap Denpasar hanya sebagai tempat untuk berkerja semata-mata, bukan untuk membangun kampung halaman baru yang lebih baik dari asalnya, tidak memiliki visi untuk menjadi penduduk tetap, tidak ada upaya untuk

mengkulturasi budaya asalnya dengan budaya setempat, sehingga tidak ada semangat dan kepedulian terhadap solidaritas penduduk asli setempat walau untuk solidaritas seumat, sesuku dan seasalnya tetap tinggi; tidak ada minat membangun kemasyarakatan di komunitas kerjanya; tidak ada keinginan bertanggung jawab terhadap keindahan permukiman di tempat kerjanya; tidak ada semangat kohesi sosial di luar etnik dan agamanya. Akibat dari semua itu, kecintaan terhadap kelestarian dan keindahan lingkungannya sangat lemah, kebutuhan dan niat untuk membangun arsitektur rumah tinggal yang baik dan asri di rantau tidak ada. Pemahaman, kesadaran dan semangat akan arti kesehatan dan keindahan lingkungan sebagai sumber kesehatan tubuh dan keindahan jiwa sangat kurang. Ini cermin dari Modal Sosial yang rendah.

2. Dampak Negatif Kesemrawutan Permukiman Terpinggirkan

Dampak negatif kesemrawutan arsitektur permukiman terpinggirkan dalam lingkup luas atau kota adalah dapat menjadi penyakit dari keindahan pemandangan kota dan pemborosan sumber daya Negara/kota. Dari segi kesehatan, kesemrawutan arsitektur dan kekumuhan permukiman terpinggirkan di kota dapat menjadi sumber berbagai jenis penyakit epidemi seperti muntaber, kolera, malaria, deman berdarah dan lain-lain. Kesemrawutan arsitektur juga berpengaruh pada psikis atau kejiwaan seperti perasaan tidak senang tinggal di rumah atau di lingkungan permukimannya, yang dapat mendorong sebagian warga untuk selalu ingin keluar rumah. Yang berarti arsitektur telah gagal memberi rasa nyaman dan aman baik secara fisik dan kejiwaan, tidak mampu mendidik/menata perilaku penghuninya untuk hidup teratur atau berkepribadian.

Dalam kasus Denpasar, berdasarkan paparan hasil-hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi fisik arsitektur pada permukiman kumuh di Denpasar berada dalam kondisi tidak layak dan tidak memenuhi orientasi kesehatan dan keamanan lingkungan, dapat dilihat dari rendahnya kualitas bahan bangunan yang dipakai dan tidak terpenuhinya syarat sanitasi lingkungan akibat ketersesakan bangunan dan terbatasnya lahan kosong untuk pembuangan yang menimbulkan kesan kumuh dan semrawut.

Sempitnya ruang dalam dari rumah tidak memenuhi standar kenyamanan dan *privacy*. Demikian juga dengan sistem konstruksi rumah yang tidak memenuhi standar mutu keamanan untuk permukiman. Keamanan yang dimaksud adalah dari segi kekuatan dalam menahan beban dan goyangan gempa bumi, aman dari bencana banjir, kebakaran, dan lain-lain.

Semua itu tercermin dari hasil penelitian Suwitri (2006:81,85) bahwa adanya perasaan tidak senang kepada rumah dan lingkungan permukiman dari masyarakat yang bermukim di sana. Timbulnya perasaan tidak menyenangkan dalam menempati rumah, disebabkan oleh berbagai alasan, sebagai berikut: kebanyakan (32 %) karena alasan rumah sumpek/pengap; 26 % rumah sempit; 24 % atap bocor dan rumah becek bila musim hujan; 7 % alasan sudah biasa; 6 % karena penghuni rumah banyak dan 5 % karena tidak ada ruang pribadi (*privacy*), Ketidaksenangan terhadap lingkungan permukimanannya juga didasari berbagai alasan: 23 % karena prasarana lingkungan kurang memadai; 22 % lingkungan kurang bersih; 22 % jarak antar tetangga terlalu berdekatan; 21 % banjir di musim hujan; 7 % sudah biasa; dan 5 % tidak senang karena di lingkungannya sering terjadi tindakan kriminal.

Suwitri juga mengungkapkan bahwa dalam kehidupan masyarakat di permukiman kumuh sangat sulit mendapat *privacy*, akibat keterbatasan ruang yang mereka miliki, sehingga mereka merasa sulit menempatkan sesuatu agar bebas dari gangguan yang tidak dikehendaki, termasuk sulit mendapatkan ruang untuk menyendiri bila saat dibutuhkan. Karena tidak adanya kenyamanan tinggal di rumah menyebabkan mereka cenderung pergi ke luar rumah. Mereka juga sulit membangun *personal space* (batas tak tampak yang orang lain merasa enggan atau merasa tidak etis memasukinya). Mereka juga merasa tidak memiliki *territoriality* atau batas teritorial antar penghuni satu dengan yang lain karena kebanyakan mereka yang bermukim di permukiman kumuh adalah dengan menyewa rumah atau kamar. Batas antar kamar hanya dipisahkan oleh dinding batako, gedeg atau papan, maka sulit bagi mereka menghindari dari gangguan, misalnya akibat konflik keluarga di tetangga sebelah.

Penemuan lain yang menarik adalah dari segi keamanan lingkungan, masih cukup rawan. Penelitiannya dari sudut kriminalitas di lingkungan kumuh masih cukup tinggi, ada 24 % responden menyatakan lingkungannya pernah mengalami gangguan tindakan kriminal, umumnya berupa pencurian. Sedangkan berkaitan dengan tindakan amoral di lingkungannya ada 46 % berupa mabuk-mabukan (mabuk sendiri adalah salah bentuk pelarian dari masalah, *pen.*). Yang menarik, di beberapa permukiman kumuh di Denpasar ada beberapa responden menyatakan ada prostitusi di lingkungannya. Salah satu narasumber yang diperoleh Suwiti juga memberi keterangan bahwa, kriminal kerap terjadi di lingkungannya, umumnya pelaku kriminal tinggal di lingkungan seperti ini, tetapi pelaku juga melakukan kejahatan di tempat/lingkungan lain.

Ini membuktikan bahwa berbagai stereotip yang muncul tentang perkampungan kumuh atau miskin kota, sebagai sumber kejahatan, patologi kebudayaan dan disorganisasi sosial bisa jadi benar, terlebih-lebih apabila memang benar masyarakat urban kurang/lemah dalam melakukan kohesi sosial dan membangun solidaritas sosial bersama masyarakat asli setempat, yang salah satu dampaknya ialah rawannya keamanan lingkungan. Sebaliknya, bila kohesi sosial mereka kuat hanya di antara sesama suku, agama, dan asal maka dampak yang timbul justru lebih parah, yaitu timbulnya benih ketidakpercayaan, kecemburuan sosial antar etnik, agama, sebagai akibat dari nasionalisme sempit/kedaerahan. Terlihat dari hasil penelitian Dedi Prasetyo, dkk. (2003) dalam tinjauan aspek sosial budayanya menemukan bahwa kegiatan tolong menolong sesama tetangga permukiman kumuh ditandai dengan saling kunjung mengunjungi dan membantu warga lain yang mempunyai hayatan ataupun kesusahan sebagai manifestasi kuatnya hubungan sosial di antara mereka.

3. Solusi Penataan Arsitektur Permukiman Terpinggirkan

Pemecahan masalah terhadap adanya permukiman terpinggirkan bukanlah hal yang mudah sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siapa pun dan dinas mana pun yang dilibatkan oleh pemerintah kota dalam

perencanaan dan penataan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Budihardjo (1998: 151-152), adalah:

1. Masalah kepribadian atau *personality*. Masyarakat berpenghasilan rendah sebagai orang yang biasa tinggal di dalam rumah-rumah yang sempit di kota mempunyai *outdoor personality*, yaitu tidak suka diam di dalam rumah, melainkan lebih suka beraktivitas di luar rumah. Misalnya mengobrol dengan tetangga di jalanan, mandi dan mencuci ke sungai, mengobrol dengan orang lain di pasar dan sebagainya.
2. Masalah “*Sense of belongingness*”. Merupakan permasalahan dalam rasa kepemilikan di mana masyarakat berpenghasilan rendah ini biasanya mau memelihara fasilitas-fasilitas pribadi dengan sebaik-baiknya.
3. Masalah merubah kebiasaan sehari-hari. Berkaitan dengan kehidupan keseharian yang sering kali/berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan, maka perlu dipilah mana yang bisa dipertahankan dan yang tidak, untuk memudahkan cara hidup mereka di lingkungan yang baru ataupun meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Dalam penataan arsitektur permukiman kumuh bagi masyarakat yang modal sosial rendah, tidak mungkin mengharapkan datangnya inisiatif dari pihak mereka sendiri. Karena itu, dibutuhkan peran pihak ketiga dalam hal ini dinas pemerintah terkait, dengan melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memahami kompleksitas masalah permukiman kumuh, bukan saja dari segi teknis-teknologis tetapi terutama dari segi sosial-budayanya. Sebaliknya, perencanaan penataan arsitektur di permukiman kumuh kota, tidak bisa hanya dari satu arah oleh pihak/penguasa saja, tetapi harus bersifat timbal balik, dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat di permukiman kumuh sebagai subjek utama. Minimal penguasa memperhatikan aspirasi dan masukan dari mereka, karena mereka yang akan hidup di sana dan mereka lebih tahu kebutuhan mereka sendiri tentang fungsi guna ruang, serta lebih faham kondisi lingkungannya. Penentu kebijaksanaan hanya wajib memberi pengarah teknik penataan ke arah yang lebih baik dan manusiawi, membantu

pengerjaan menuju standar baku mutu keamanan, kenyamanan, dan keindahan arsitektur permukiman kota yang beradab.

Masyarakat miskin yang menjadi sasaran proyek harus diberi kebebasan dalam mengatur dan membentuk kawasan permukiman mereka sendiri. Peran aktif penduduk miskin bukan lagi dianggap sekedar unsur pelengkap perbaikan permukiman kumuh kota, tetapi sudah menjadi suatu unsur fundamental atau mutlak, sebab hanya dengan begitulah mereka dapat menemukan jati dirinya masing-masing dalam berarsitektur, sehingga dapat lebih membangkitkan modal sosial mereka untuk pembangunan kota tujuan.

Tidak diharapkan pola penataan yang militeristik dengan penyeragaman bentuk arsitektur, karena masing-masing masyarakat miskin pun memiliki keunikan perilaku dan keanekaragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya sebagai jati dirinya masing-masing. Biarkan mereka menunjukkan jati dirinya di dalam perencanaan dan penataan arsitektur/ lingkungan pribadi mereka, karena pada hakekatnya jati diri itulah menjadi nafas dan jiwa, pemberi karakter spesifik suatu bangunan atau lingkungan binaan manusia. Hanya dibutuhkan sedikit adaptasi pada wajah depan arsitektur, disesuaikan dengan visi dan misi Perda tentang Arsitektur Daerah masing-masing kota. Oleh karena itu untuk bisa menggali keinginan, harapan dan dambaan yang sebenarnya dari penduduk miskin kota, para pimpinan daerah dan perencana kotalah yang harus lebih banyak meninggalkan 'singgasana'-nya untuk turun ke daerah permukiman terpinggirkan, merasakan denyut nadi yang berdetak di masyarakat.

4. Kendala Pelaksanaan Program Penataan dan Alternatif Pemecahan

Misi penataan arsitektur permukiman terpinggirkan ke arah lebih manusiawi, yang mampu menjamin berbagai bentuk kontak sosial, saling hubungan yang intim dan personal, penciptaan kedamaian dan kesejahteraan sering menghadapi berbagai kendala. Kendala kadang datangnya dari pihak penentu kebijaksanaan atau instansi berwenang karena dibabat habis oleh dorongan ego pejabat yang narkistis (menganggap diri paling benar), demi ambisi

kekuasaan dan kepentingan pribadi. Hati dan perasaan dikalahkan oleh pikiran dan penalaran. Pertimbangan sosio-budaya ditindas oleh pemikiran ekonomis yang *profit-motivated*. Kurangnya kesadaran bahwa, yang diinginkan oleh masyarakat miskin di perkampungan kumuh kota adalah: hunian dengan ruangan luar ataupun dalam yang tidak sumpek, mendapat penerangan alami yang cukup, dan terkait dengan kegiatan usaha yang mereka lakukan. Alternatif pemecahannya dengan perbaikan mental dan peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan dari masyarakat miskin kota ini.

Sumber kendala lain, bisa juga datang dari warga masyarakat yang menjadi subjek pada sasaran program (pemilik rumah atau lahan dan calon penghuni/penyewa). Kendala seperti ini juga akan dihadapi oleh para penentu kebijaksanaan berkaitan dengan penataan kampung miskin atau kumuh di kota Denpasar, disebabkan oleh:

1. Kepemilikan rumah/lahan berada di tangan penduduk lokal yang beragama berbeda dari penghuni kampung kumuh. Hal ini menyebabkan sulitnya menata arsitektur sesuai dengan kehendak penghuni, bila tidak ada persetujuan pemilik asli setempat. Berarti harus ditemukan jalan keluar agar memuaskan semua pihak, mungkin dengan sistem kontrak jangka panjang, disesuaikan dengan kekuatan umur bangunan, sehingga penghuni/penyewa tidak merasa terlalu rugi setelah habis masa kontrak, didasarkan perhitungan ekonomi dan modal untuk menata atau perbaikan bangunan. Agar tidak ada permasalahan di belakang hari, maka pembuatan kontrak harus memiliki kekuatan hukum jelas dan tegas di saksikan dan dilindungi oleh pihak yang berwenang.
2. Semangat untuk hidup menetap yang rendah sebagai salah satu bentuk rendahnya modal sosial dari kaum urban, membutuhkan sosialisasi intensif tentang arti kehidupan dan penghidupan yang lebih baik di daerah tujuan dan berbagai bentuk keuntungan yang dihasilkannya. Semua dapat dikaitkan dengan Rencana Program Penataan arsitektur dan lingkungan permukiman mereka, melalui penyadaran akan arti positif ketertiban dan keindahan arsitektur serta lingkungan bagi kesehatan fisik dan

- keindahan jiwa mereka. Sekaligus mencari masukan dari mereka tentang pola ruang arsitektur dan permukiman yang mereka inginkan.
3. Kemiskinan kaum urban, tidak menjamin mereka mampu membayar *cash* sewa rumah atau lahan untuk jangka panjang. Harus dicarikan mekanisme sistem pembayaran yang efektif, melalui sistem kredit perbankan. Mengingat masyarakat miskin banyak yang tidak memiliki jaminan, harus ada solusi yang mampu menjamin keamanan pengembalian kredit bank, misalnya dengan sistem pendataan penduduk pendatang secara baik dan pasti (*crosscheck* ke daerah asalnya). Atau, dicari sistem bapak angkat dari kelompok sosial mereka yang telah mampu.
 4. Kepribadian kaum urban yang eksklusif (cenderung membedakan, mencurigai kesetiaan dan kepercayaan orang di luar suku, agama, dan golongannya) dalam hubungan sosial, perlu proses penyadaran intensif, terutama oleh kalangan sosial mereka sendiri yang telah mampu, memiliki wawasan luas/maju dan terbuka.
 5. Adanya sikap fatalistik kaum miskin kota, harusnya bukanlah alasan yang benar untuk menuduh mereka sebagai orang malas, kurang kreatif, kurang semangat dalam menghadapi kemiskinan. Harus dicari alternatif pemecahan misalnya melalui pemberian bekal berbagai jenis ketrampilan yang dapat menjadi peluang usaha, membuka lapangan kerja yang lebih luas, dan membantu pemasaran produk-produk mereka. Yang terpenting, memberi bekal wawasan arti masa depan dan cita-cita terus maju, menanamkan kesadaran akan arti kemandirian dan nasionalisme (dalam arti luas), satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dalam membangun kota tujuan.
- Jurusan Teknik Arsitektur, FT UNUD.
Tidak diterbitkan
- Arieska, dkk. 2003. “*Aspek Finansial/Sosial Ekonomi Permukiman Kumuh*” (Materi Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan
- Budihardjo, Eko. 1983 & 1997. *Arsitektur dan Kota di Indonesia* (1997 dengan Tambahan Materi). Bandung, Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Candarawati, Dyah, dkk. 2003. “*Struktur dan Konstruksi Rumah Kumuh di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung*” (Materi Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Denpasar, Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan
- Prasetyo, Dedi. 2003. “*Permukiman Kumuh Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya*” (Materi Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Denpasar, Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan
- Daldjoeni, N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung, Penerbit PT. ALUMNI.
- Diputra, Pusaka. 2003. “*Permukiman Kumuh di Denpasar Ditinjau dari Aspek Ruang/Spasial*” (Materi Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Denpasar, Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital* (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta, Penerbit MR-United Press.
- Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. 1993. *Sosiologi* Edisi Keenam (Alih Bahasa: Aminuddin Ram & Tita Sobari). Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Keesing, Roger M. 1992. *Antropologi Budaya Suatu Persepektif Kontemporer* (Edisi Kedua-Alih Bahasa Soekadijo). Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kuswartojo. 1991. “*Mencari Wawasan Arsitektur*”, artikel dalam buku *Jati Diri Arsitektur Indonesia* (Budihardjo, ed.). Bandung, Penerbit Alumni.

DAFTAR PUSTAKA

Anindyasari, Ima. 2004. “*Landasan Konseptual Perancangan Penataan Permukiman Bantaran Tukad Badung di Dusun Jematang, Denpasar*”, Tugas Akhir

- Lomnitz, L.A. 1977. *Networks and Marginality: Life in a Mexican Shanty Town*. New York, Academic Press, Inc.
- Madesyawati, Dwi, dkk. 2003. “*Analisis Rumah Kumuh sebagai Tempat Produksi*” (Materi Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Denpasar, Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan
- Mangunwijaya, Y.B. 1995. *Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur, Sendi-sendi Filsafatnya beserta Contoh Praktis*. Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muller, Johannes. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, Haryadi B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Jakarta, Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI.
- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Suwitri, Dewa Ayu Alit. “*Karakteristik Permukiman Kumuh di Kota Denpasar*” (Skripsi Tugas Akhir). Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan
- Turgut, Hulya. 2001. *Culture Continuity and Change: Structural Analysis of The Housing Pattern In Squatter Seattlement* (Artikel GBER Vol. 1, No. 1): 17-25.